

Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani)

Redi Hadiyanto, Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim

*Email korespondensi: redihadiyanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas sejarah kebijakan moneter dalam konteks Islam selama periode Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani. Masing-masing periode ini mencerminkan dinamika ekonomi dan politik yang unik, yang memberikan dampak pada pengembangan sistem moneter dalam kerangka nilai-nilai Islam. Pada masa Fathimiyah (909-1171 M), kebijakan moneter tercermin dalam penggunaan tradisional mata uang dinar dan dirham, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selama periode Mamalik (1250-1517 M), hubungan perdagangan dan interaksi dengan dunia luar memainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi dan moneter mereka. Pengaruh perdagangan dan hubungan luar negeri pada kebijakan moneter Mamalik memengaruhi kestabilan mata uang dan ekonomi mereka. Persia, dengan kekayaan alam dan sejarah keuangan yang panjang, memiliki pengaruh yang kuat pada kebijakan moneter, terutama selama Dinasti Safawiyah (1501-1736 M). Di India, masa Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani (1206-1527 M) mencerminkan penggunaan mata uang emas dan perak seiring dengan tradisi Islam. Terakhir, dalam konteks Turki Utsmani, sistem moneter kompleks mencakup penggunaan mata uang bimetal dan perak, mencerminkan kekuatan ekonomi dan politik Utsmani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan kebijakan moneter Islam selama periode tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Islam, Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani

Abstract

This research discusses the history of monetary policy in the Islamic context during the Fatimid, Mamalik, Persian, Indian and Ottoman periods. Each of these periods reflects unique economic and political dynamics, which had an impact on the development of a monetary system within the framework of Islamic values. During the Fatimid era (909-1171 AD), monetary policy was reflected in the traditional use of the dinar and dirham currency, in line with Islamic economic principles. During the Mamalik period (1250-1517 AD), trade relations and interactions with the outside world played an important role in shaping their economic and monetary systems. The influence of trade and foreign relations on Mamalik monetary policy influences the stability of their currency and economy. Persia, with its natural wealth and long financial history, had a strong influence on monetary policy, especially during the Safavid Dynasty (1501-1736 AD). In India, the Delhi Dynasty and Bahmani Sultanate (1206-1527 AD) reflected the use of gold and silver currency in line with Islamic traditions. Finally, in the context of Ottoman Turkey, the complex monetary system included the use of bimetallic currency and silver, reflecting Ottoman economic and political power. This research aims to provide a better understanding of the development of Islamic monetary policy during this period.

Keywords: Islamic Monetary Policy, Fatimid, Mamalik, Persia, India and Ottoman Turkey

Saran sitasi: Hadiyanto, R., Pusvisasari, L., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1117-1129. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>

1. PENDAHULUAN

Sejarah Islam merupakan landasan penting untuk memahami evolusi berbagai aspek kehidupan

ekonomi,(J. Suyuthi Pulungan 2022) termasuk kebijakan moneter yang dijalankan oleh berbagai pemerintahan dan dinasti di berbagai wilayah dunia

Muslim. Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas sejarah kebijakan moneter dalam Islam pada masa Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani, merinci perubahan dan dinamika yang memengaruhi sistem keuangan pada periode tersebut.

Pada masa Fathimiyah (909-1171 M), dinasti Syi'ah Ismaili yang berkuasa di sebagian besar wilayah Arab dan Afrika Utara, kebijakan moneter tercermin dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham yang telah menjadi bagian integral dari tradisi ekonomi Islam. (Samsul Munir Amin; 2022) Kajian ini akan melihat bagaimana kebijakan moneter Fathimiyah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam pada masa itu, serta bagaimana sistem ini berkembang selama periode tersebut. (Mu'nis 2022) Konteks Fathimiyah mencerminkan masa ketika Islam pertama kali mengakar dalam sistem pemerintahan di berbagai wilayah. Kebijakan moneter mereka mencerminkan bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham, masyarakat Fathimiyah mengakui pentingnya menjaga stabilitas nilai uang dan transparansi dalam sistem keuangan. (As-Sirjani 2013)

Sementara itu, periode Mamalik (1250-1517 M) menciptakan lanskap yang berbeda, di mana pengaruh perdagangan dan hubungan luar negeri memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan moneter mereka. (2017) Penelitian ini akan membongkar bagaimana Mamalik menyesuaikan sistem keuangannya dengan dinamika perdagangan internasional dan apakah kebijakan ini memengaruhi stabilitas ekonomi mereka. Mamalik, yang muncul setelah Fathimiyah, memasuki era di mana perdagangan internasional menjadi faktor dominan dalam membentuk kebijakan ekonomi dan moneter. (Thaqqus t.t) Pengaruh perdagangan tersebut menciptakan tuntutan baru dalam manajemen keuangan, mengharuskan Mamalik untuk menyesuaikan kebijakan moneter mereka dengan dinamika pasar global. Sebagai pusat perdagangan dunia, Mamalik harus menghadapi tantangan unik dalam menjaga stabilitas mata uang dan pertumbuhan ekonomi.

Persia, dengan sejarahnya yang kaya dan masa kekuasaan Dinasti Safawiyah (1501-1736 M), menjadi fokus bagi studi mendalam tentang penggunaan mata uang emas dan perak serta peran kebijakan moneter dalam mengelola kekayaan alam dan perdagangan di wilayah tersebut. (Aizid 2018)

Dinasti Safawiyah di Persia menyaksikan evolusi kebijakan moneter yang sejalan dengan kekayaan alam yang melimpah. (Madjid 2019) Adopsi mata uang emas dan perak mencerminkan hubungan antara kebijakan keuangan dan sumber daya alam Persia.

Kesultanan Bahmani dan Dinasti Delhi di India, menandai keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan keanekaragaman ekonomi India yang melibatkan berbagai budaya dan perdagangan. India, dengan Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani (1206-1527 M), menawarkan kontras yang menarik antara Islam dan kekayaan kultural India. (Brownstok, Krause, dan Galbinst t.t.) Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan moneter mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dengan konteks ekonomi India yang beragam, dan sejauh mana hal ini memengaruhi stabilitas ekonomi.

Turki Utsmani akan memerinci bagaimana sistem moneter kompleks mereka mencakup penggunaan mata uang bimetal, perak, dan inovasi keuangan seperti surat berharga dan sistem perbankan Islam, serta bagaimana hal itu memberikan kontribusi pada stabilitas ekonomi dan kemakmuran Utsmani. Masa kekuasaan Turki Utsmani melibatkan kebijakan moneter yang lebih kompleks dengan penggunaan mata uang bimetal dan sistem perbankan Islam. Pada puncak kejayaannya, Utsmani menjadi contoh bagaimana kebijakan moneter yang bijaksana dapat mendukung stabilitas ekonomi dalam skala besar. (Ash-Shallabi t.t.)

Dengan menguraikan perkembangan kebijakan moneter dalam Islam pada periode dan wilayah ini, penelitian ini berupaya memberikan wawasan mendalam tentang peran nilai-nilai Islam dalam membentuk sistem keuangan dan ekonomi di masa lalu, memberikan landasan untuk pemahaman yang lebih baik tentang evolusi kebijakan moneter Islam secara keseluruhan.

Pentingnya memahami sejarah kebijakan moneter Islam pada periode Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik ekonomi dan keuangan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pemerintahan, kebijakan moneter menjadi alat utama untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, sekaligus mencerminkan visi Islam dalam urusan finansial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan analisis komparatif (M.Si. (Penyunting) 2021) untuk menjelajahi sejarah kebijakan moneter dalam Islam pada masa Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani. Metodologi ini dipilih untuk memahami evolusi kebijakan moneter dalam konteks historis yang melibatkan sejumlah wilayah yang berbeda. Analisis dimulai dengan studi mendalam literatur sejarah, ekonomi, dan keuangan Islam pada masing-masing masa dan wilayah. Pencarian sumber-sumber utama dan sekunder, termasuk teks sejarah, dokumen keuangan, dan catatan kontemporer untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan moneter.

Pendekatan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kebijakan moneter antara Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani. Analisis ini memperhatikan konteks historis, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor budaya yang memengaruhi pengembangan kebijakan moneter. Melakukan pemetaan kronologis perubahan kebijakan moneter pada setiap masa dan wilayah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memotivasi perubahan tersebut, menyusun kerangka waktu yang memungkinkan untuk melihat tren jangka panjang dan peristiwa krusial dalam pengembangan kebijakan moneter.(Mardawani 2020)

Melakukan analisis kualitatif terhadap narasi sejarah dan dokumen-dokumen kebijakan untuk memahami konteks dan motivasi di balik kebijakan moneter.(Mardawani 2020) Memvalidasi temuan dengan membandingkan dan mempertimbangkan berbagai sumber sejarah serta mendiskusikan hasil temuan dengan ahli terkait, dan menyusun kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti sejarah dan analisis komparatif. Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah kebijakan moneter dalam Islam pada masa Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani, serta kontribusi unik masing-masing periode terhadap perkembangan sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Fathimiyah (909-1171 M)

Dinasti Fathimiyah, yang berakar dalam paham Syi'ah Ismaili, memiliki kekuasaan yang signifikan di wilayah utara Afrika dan sebagian besar wilayah Arab

pada abad ke-10 hingga abad ke-12 M.(Thaqqusy t.t.) Pemimpin utama dari dinasti ini adalah Imam-imam Ismaili, yang memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan politik, ekonomi, dan agama pada masa itu. Kondisi ekonomi dan politik regional pada masa Fathimiyah memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan moneter yang diadopsi. Perdagangan lintas wilayah dan kekayaan alam regional memainkan peran dalam membentuk kebijakan ekonomi. Dinasti ini mungkin menghadapi tekanan dari kekuatan-kekuatan regional dan memformulasikan kebijakan moneter sebagai respons terhadap dinamika geopolitik pada masa itu.(J. Suyuthi Pulungan 2022)

Kebijakan moneter Fathimiyah kemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi. Penggunaan mata uang dinar dan dirham mencerminkan konsistensi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong penggunaan logam mulia sebagai standar nilai. Penggunaan terus menerus mata uang dinar dan dirham menunjukkan kesinambungan tradisi ekonomi Islam dalam sistem keuangan Fathimiyah. Mata uang ini tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga simbol nilai-nilai Islam yang terkandung dalam perdagangan dan keuangan.(Bobrick 2013)

Keterlibatan Fathimiyah dalam tradisi ekonomi Islam menunjukkan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam kebijakan ekonomi mereka. Penggunaan mata uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tidak hanya mencerminkan kebijakan moneter, tetapi juga aspirasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembahasan mengenai Fathimiyah menyoroti pentingnya konteks sejarah, ekonomi, dan nilai-nilai Islam dalam membentuk kebijakan moneter. Penerusan tradisi ekonomi Islam, khususnya melalui penggunaan mata uang dinar dan dirham, mencerminkan komitmen Fathimiyah terhadap prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam pada masa itu.(dkk 2019)

Peran Dinasti Fathimiyah dalam Perdagangan

Sebagai pemain utama dalam perdagangan regional, Fathimiyah memiliki kontrol yang signifikan atas jalur perdagangan dan sumber daya ekonomi. Kebijakan moneter mereka mungkin mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dalam hubungan perdagangan dan mengoptimalkan manfaat ekonomi

dari wilayah yang mereka kuasai. Penggunaan mata uang dinar dan dirham, yang berbasis pada logam mulia, bukan hanya mencerminkan tradisi ekonomi Islam tetapi juga kepercayaan pada kestabilan nilai intrinsik mata uang. Logam mulia dianggap sebagai standar nilai yang tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar dan menciptakan fondasi kepercayaan dalam transaksi ekonomi. (Qoyum 2021)

Kebijakan moneter Fathimiyah juga memiliki dampak pada perekonomian lokal. Penggunaan mata uang yang stabil membantu menciptakan iklim kepercayaan di antara pedagang dan pelaku ekonomi, mendorong pertumbuhan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.

Hubungan antara Kebijakan Moneter dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat pada masa Fathimiyah tercermin dalam kebijakan moneter mereka. Stabilitas mata uang dan sistem keuangan yang diatur dengan baik dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Kesinambungan penggunaan mata uang dinar dan dirham juga menandakan adanya konsistensi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan moneter Fathimiyah. Hal ini mungkin mencerminkan keinginan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Melalui analisis ini, dapat dievaluasi bagaimana kebijakan moneter Fathimiyah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan perkembangan masyarakat pada masa itu. (2018)

Perbandingan dengan dinasti lain dan periode sejarah tertentu dapat memberikan wawasan tambahan tentang keunikan dan kontribusi Fathimiyah dalam konteks ekonomi Islam. Pemahaman mendalam tentang kebijakan moneter Fathimiyah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian selanjutnya tentang evolusi sistem keuangan Islam. Implikasi dari penggunaan mata uang dinar dan dirham pada periode ini dapat terus memberikan inspirasi untuk kebijakan moneter dan ekonomi Islam pada masa-masa berikutnya. (Amir 2021)

Dampak pada Keberlanjutan Ekonomi

Kebijakan moneter yang stabil dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. Dengan menggunakan mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan terkait dengan logam mulia, Fathimiyah mungkin berusaha untuk mencegah fluktuasi ekonomi yang merugikan. Pemahaman mendalam tentang

kebijakan moneter Fathimiyah tidak hanya memberikan wawasan historis tetapi juga dapat memiliki relevansi kontemporer. Konsep-konsep seperti penggunaan mata uang logam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan inspirasi untuk pemikiran tentang sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam pada masa kini. (Harymawan dkk. 2022)

Keberlanjutan penggunaan mata uang dinar dan dirham juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari sejarah perkembangan sistem keuangan Islam. Peran Fathimiyah dalam memelihara tradisi ekonomi Islam menjadi kontribusi berharga terhadap narasi lebih luas tentang evolusi sistem keuangan berbasis Islam. Konteks sejarah menjadi kunci untuk memahami kebijakan moneter Fathimiyah. Pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi, politik, dan budaya pada saat itu diperlukan untuk mengevaluasi konsekuensi dan dampak kebijakan yang diimplementasikan. Pembahasan tentang Fathimiyah juga harus mencakup tantangan dan perubahan dalam kebijakan moneter mereka seiring waktu. Mempertimbangkan bagaimana dinasti ini menanggapi perubahan ekonomi dan politik regional dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap.

3.2. Mamalik (1250-1517 M)

Mamalik awalnya merupakan budak militer yang dipekerjakan oleh kekaisaran-kekaisaran Islam sebelumnya. Namun, pada tahun 1250 M, mereka berhasil merebut kekuasaan di Mesir dan wilayah sekitarnya. Meskipun mereka memiliki latar belakang budak, Mamalik mampu mendirikan dinasti dan menjadi penguasa yang stabil. Sistem ekonomi dan moneter Mamalik sangat dipengaruhi oleh perdagangan dan hubungan dengan dunia luar. Selama masa Kekaisaran Mongol, hubungan ini menjadi semakin penting dan memainkan peran signifikan dalam membentuk kebijakan ekonomi Mamalik. Perdagangan lintas wilayah, khususnya dengan bangsa-bangsa Eropa dan Asia, memberikan Mamalik akses ke berbagai sumber daya dan produk, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan ekonomi mereka. (Conermann 2014)

Seperti yang terjadi pada masa Fathimiyah, Mamalik juga meneruskan penggunaan mata uang emas dan perak. Hal ini mencerminkan tradisi Islam yang memandang logam mulia sebagai standar nilai yang stabil dan memiliki nilai intrinsik. Penggunaan mata uang emas dan perak juga dapat dikaitkan

dengan perdagangan internasional, di mana kehadiran emas dan perak menjadi penting dalam transaksi lintas batas. Kebijakan moneter Mamalik mencerminkan keterlibatan mereka dalam tradisi Islam dalam sistem keuangan. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan ekonomi dan stabilitas mata uang, terus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan kebijakan moneter.

Hubungan dengan Kekaisaran Mongol membawa tantangan baru yang mungkin memengaruhi sistem ekonomi dan moneter Mamalik. Perubahan dalam dinamika perdagangan, tekanan politik, dan perubahan dalam kondisi ekonomi global dapat memaksa Mamalik untuk menyesuaikan kebijakan keuangannya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Mata Uang

Meskipun dihadapkan dengan tantangan dari kekuatan luar, Mamalik juga mengalami periode pertumbuhan ekonomi dan stabilitas mata uang. (2021) Keberlanjutan penggunaan mata uang emas dan perak mungkin menjadi indikator bahwa kebijakan ekonomi Mamalik berhasil mencapai tujuan stabilitas dan keberlanjutan. Perdagangan internasional memiliki peran sentral dalam membentuk kebijakan ekonomi Mamalik. Hubungan yang erat dengan berbagai bangsa dan kebudayaan membawa konsekuensi signifikan terhadap kebijakan keuangan dan moneter mereka. Kita dapat melihat bahwa Mamalik mengelola sistem ekonomi dan moneter mereka dengan mempertahankan tradisi Islam dan sekaligus beradaptasi dengan dinamika perdagangan dan hubungan luar yang semakin kompleks pada masa itu. Keberlanjutan penggunaan mata uang emas dan perak menjadi salah satu contoh konkret bagaimana Mamalik melanjutkan warisan ekonomi Islam.

Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Selama pemerintahan Mamalik, terjadi pembangunan infrastruktur yang signifikan, terutama di Mesir. Pembangunan kanal, jalan, dan fasilitas perdagangan lainnya dapat dilihat sebagai langkah-langkah strategis untuk memperkuat basis ekonomi mereka. Infrastruktur yang berkembang juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kestabilan mata uang melalui fasilitasi perdagangan. Mamalik mungkin juga telah berupaya mendiversifikasi basis ekonomi mereka. Dengan mengandalkan sumber daya yang beragam, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, mereka

dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

Pengembangan kebijakan ekonomi dapat juga melibatkan peningkatan keahlian dan inovasi dalam sektor-sektor tertentu. Peningkatan keterampilan dalam produksi barang atau layanan tertentu dapat meningkatkan daya saing Mamalik dalam perdagangan regional dan internasional.

Hubungan dengan Dunia Islam Lainnya

Mamalik, sebagai bagian dari dunia Islam yang lebih luas, mungkin juga terlibat dalam pertukaran pengetahuan ekonomi dan praktik keuangan dengan negara-negara Islam lainnya. Ini dapat memengaruhi evolusi kebijakan ekonomi mereka dan menghasilkan solusi yang inovatif untuk tantangan ekonomi yang dihadapi. Kebijakan ekonomi dan moneter yang efektif dapat menciptakan iklim yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas mata uang, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang adil mungkin berkontribusi pada peningkatan taraf hidup bagi penduduk Mamalik.

Mengingat posisi geopolitik mereka, Mamalik mungkin telah dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal, termasuk perubahan dalam perdagangan global, konflik politik, dan tekanan ekonomi dari kekuatan asing. Bagaimana mereka menanggapi tantangan-tantangan ini dapat tercermin dalam kebijakan ekonomi dan moneter mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan ekonomi dan moneter Mamalik dapat memberikan kontribusi pada warisan sistem keuangan Islam. Pemahaman ini dapat membantu melacak evolusi sistem keuangan Islam melalui waktu dan mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di dunia Islam.

Studi mengenai Mamalik juga dapat memberikan wawasan tentang relevansi kontemporer dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mereka terapkan. Pemikiran ini dapat membuka jalan bagi pertimbangan kebijakan ekonomi dan moneter yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam pada era modern.

3.3. Persia, Khususnya pada Periode Safawiyah (1501-1736 M)

Persia, yang memiliki sejarah keuangan yang kaya, telah menjadi pusat perdagangan dan kekayaan sepanjang sejarah Islam. Terutama pada masa kekuasaan Safawiyah, kebijakan ekonomi dan moneter menjadi sangat signifikan. Dinasti Safawiyah yang memerintah Persia dari tahun 1501 hingga 1736 M memiliki dampak besar pada sejarah dan

perkembangan kebijakan moneter di wilayah tersebut. Periode ini mencakup puncak kejayaan kebudayaan Persia dan pengaruh signifikan di panggung internasional. (Afdhal dkk. 2023)

Sebagai pusat perdagangan dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, Persia di bawah Safawiyah memiliki pengaruh ekonomi yang besar. Kebijakan moneter mereka mungkin tercermin dari upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini dengan bijak. Pengaruh perdagangan, terutama dengan dunia luar, memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan ekonomi Persia. Hubungan perdagangan yang erat dengan berbagai negara membawa pengaruh global pada kebijakan ekonomi, dan pengelolaan kekayaan alam, termasuk sumber daya tambang emas dan perak, menjadi fokus utama.

Selain itu, kebijakan ekonomi Safawiyah mencakup pertumbuhan industri dan manufaktur, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi daerah. Penerapan prinsip-prinsip agama Islam, seperti keadilan ekonomi dan etika bisnis, juga memengaruhi kebijakan ekonomi mereka. (A 2018)

Masa Safawiyah juga menyaksikan upaya untuk merespons perubahan ekonomi global dan menghadapi krisis tertentu yang mungkin muncul. Hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah di sebelah barat juga memiliki dampak signifikan pada kebijakan ekonomi Persia.

Penggunaan Mata Uang Emas dan Perak

Kebijakan moneter Safawiyah dapat dicerminkan dalam penggunaan mata uang emas dan perak. Seperti halnya pada masa-masa sebelumnya dalam sejarah Islam, penggunaan logam mulia ini mencerminkan nilai-nilai tradisional ekonomi Islam dan memberikan stabilitas pada sistem keuangan. (Kamil 2022) Penggunaan mata uang yang stabil dapat memberikan kepercayaan dalam perdagangan dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Safawiyah mungkin menciptakan kebijakan untuk menjaga stabilitas mata uangnya agar dapat memfasilitasi hubungan dagang yang kuat. Kekayaan alam Persia, termasuk tambang emas, perak, dan berbagai sumber daya lainnya, memainkan peran kunci dalam pengembangan kebijakan ekonomi. Bagaimana Safawiyah mengelola sumber daya ini dapat memberikan wawasan tentang fokus mereka dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kestabilan.

Hubungan dengan Dunia Islam dan Non-Islam

Persia, sebagai bagian dari dunia Islam, juga menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam lainnya dan entitas non-Islam. (PhD t.t.) Pengaruh dari hubungan ini mungkin tercermin dalam kebijakan moneter mereka, terutama dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Safawiyah dapat memiliki peran dalam perkembangan sistem perbankan dan keuangan Islam pada masa itu. Inovasi seperti pengenalan bentuk-bentuk perbankan syariah dan instrumen keuangan dapat menjadi bagian dari kebijakan ekonomi mereka.

Situasi politik pada masa kekuasaan Safawiyah, terutama dalam konteks persaingan geopolitik di wilayah tersebut, mungkin memainkan peran dalam pengembangan kebijakan ekonomi dan moneter mereka. Bagaimana mereka merespons tantangan politik dapat tercermin dalam strategi ekonomi mereka. Warisan ekonomi Safawiyah dapat terus membentuk landasan untuk pemikiran dan kebijakan ekonomi di Persia dan wilayah sekitarnya. Pemahaman lebih lanjut tentang periode ini dapat memberikan wawasan tentang evolusi sistem ekonomi Islam. (Aizid t.t.)

Persia memiliki sejarah keuangan yang kaya sepanjang sejarah Islam, terutama selama periode kekuasaan Safawiyah. Pada masa ini, kebijakan moneter di Persia tercermin dari situasi ekonomi dan politik saat itu, dengan pengaruh yang signifikan dari perdagangan dan kekayaan alam.

Selama periode Safawiyah, Persia mempertahankan penggunaan mata uang emas dan perak, mengikuti tradisi Islam dalam sistem keuangan. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai kestabilan mata uang dan nilai intrinsik yang dianggap penting dalam ekonomi Islam.

Warisan ekonomi Safawiyah tidak hanya membentuk landasan bagi pengembangan ekonomi Persia tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan sistem keuangan Islam secara lebih luas. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi dan nuansa kebijakan ekonomi Safawiyah dengan lebih mendalam. (Latif 2006)

Pertumbuhan Industri dan Manufaktur

Masa Safawiyah juga menyaksikan pertumbuhan sektor industri dan manufaktur. Kebijakan ekonomi mereka mungkin mencakup dukungan terhadap pengembangan industri untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi ekonomi. Investasi dalam

pengembangan infrastruktur juga dapat menjadi bagian dari kebijakan ekonomi Safawiyah. Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya dapat membantu memfasilitasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Safawiyah mungkin juga menerapkan kebijakan untuk memperkuat ekonomi daerah. Pemberdayaan daerah-daerah dengan sumber daya ekonomi yang khas dapat berkontribusi pada ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebijakan ekonomi Safawiyah kemungkinan besar dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip keadilan ekonomi, zakat, dan etika bisnis dapat membentuk dasar kebijakan mereka. Safawiyah mungkin memiliki peran dalam menyelenggarakan pasar dan perdagangan yang efisien. Regulasi pasar dan kebijakan perdagangan dapat menjadi bagian dari strategi mereka untuk memastikan keseimbangan ekonomi yang stabil. Keberadaan Persia sebagai pusat perdagangan global pada masa itu mungkin membuat mereka merespons perubahan ekonomi global. Penyesuaian terhadap dinamika perdagangan internasional dapat tercermin dalam kebijakan ekonomi mereka.

Penanganan Krisis Ekonomi

Selama periode Safawiyah, mungkin terjadi krisis ekonomi atau tantangan tertentu. Kebijakan ekonomi mereka dalam menanggapi krisis tersebut dapat memberikan wawasan tentang fleksibilitas dan ketahanan ekonomi mereka. Hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah, yang berbagi perbatasan dengan Persia, dapat memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi. Perdagangan dan pertukaran budaya antara kedua kekaisaran ini dapat tercermin dalam regulasi dan kebijakan ekonomi mereka.

Warisan ekonomi Safawiyah juga dapat memengaruhi perkembangan sistem keuangan Islam lebih luas. Inovasi atau kebijakan tertentu dapat menjadi inspirasi bagi perkembangan sistem keuangan berbasis Islam pada masa mendatang. Penanganan krisis ekonomi di Persia pada masa Safawiyah mungkin mencerminkan situasi tertentu yang memerlukan tanggapan dan kebijakan khusus untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Meskipun detail spesifiknya dapat bervariasi, berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan penanganan krisis ekonomi pada masa itu:

a. Reformasi Fiskal

Dalam menghadapi krisis ekonomi, pemerintah Safawiyah mungkin menerapkan reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat basis keuangan. Ini bisa mencakup peninjauan ulang sistem pajak, pengurangan pengeluaran yang tidak penting, dan upaya lainnya untuk memastikan keberlanjutan fiskal. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang terhambat oleh krisis, Safawiyah mungkin telah menerapkan kebijakan stimulus. Ini bisa termasuk pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur, dukungan keuangan kepada sektor-sektor kunci, atau insentif lainnya untuk mendorong investasi dan konsumsi.

Safawiyah mungkin juga telah mengadopsi kebijakan kredit yang longgar atau mengimplementasikan solusi keuangan kreatif untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Ini bisa termasuk penyediaan kredit murah atau insentif bagi lembaga keuangan untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi.

b. Pengelolaan Utang

Dalam situasi di mana utang mungkin menjadi beban ekonomi, Safawiyah mungkin telah merancang kebijakan untuk mengelola utang dengan lebih efektif. Ini bisa mencakup restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditur, atau upaya lainnya untuk mengurangi tekanan keuangan. Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu yang mungkin terkena dampak krisis lebih parah, Safawiyah mungkin telah mempercepat upaya diversifikasi ekonomi. Ini bisa melibatkan investasi dalam sektor-sektor baru atau pengembangan kegiatan ekonomi alternatif.

Penanganan krisis ekonomi juga dapat melibatkan kebijakan ketenagakerjaan untuk menjaga stabilitas dan mencegah peningkatan pengangguran. Mungkin ada upaya untuk melindungi pekerja, memberikan pelatihan keterampilan baru, atau mendorong penciptaan lapangan kerja. Safawiyah, yang didukung oleh fondasi keislaman, mungkin juga telah mencari pandangan dari ulama dan cendekiawan ekonomi Islam dalam mengembangkan kebijakan ekonomi. Hal ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam.

3.4. India, Dinasti Delhi (1206-1526) dan Kesultanan Bahmani (1347-1527)

India memiliki sejarah Islam yang panjang, dan masa kekuasaan Dinasti Delhi (1206-1526 M) dan Kesultanan Bahmani (1347-1527 M) memainkan peran kunci dalam membentuk perkembangan ekonomi dan moneter di wilayah tersebut. (Hasmand t.t.)

3.4.1. Dinasti Delhi (1206-1526 M)

Dinasti Delhi adalah salah satu dinasti Islam pertama di India dan mencakup periode yang panjang. Selama masa kekuasaannya, mata uang emas dan perak terus digunakan, mencerminkan warisan moneter Islam. (Black 2006) Penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang utama menciptakan stabilitas dalam perdagangan dan transaksi ekonomi. Dinasti Delhi, yang berlangsung dari tahun 1206 hingga 1526 M, merupakan periode penting dalam sejarah India, terutama dalam konteks sejarah Islam di wilayah tersebut. Dinasti Delhi mengalami beberapa dinasti yang berbeda selama masa pemerintahannya, dan setiap dinasti tersebut berkontribusi pada perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di India.

Dinasti Delhi dimulai dengan pendirian oleh Qutb-ud-din Aibak pada tahun 1206 M setelah kemenangan pasukan Muslim di Pertempuran Tarain. Ini menandai dimulainya pemerintahan Muslim di India, yang berlanjut untuk beberapa abad ke depan. Mata uang emas dan perak terus digunakan selama masa Dinasti Delhi. Penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) menciptakan sistem moneter yang stabil dan mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi.

Perdagangan dan Urbanisasi

Dinasti Delhi menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan perdagangan dan urbanisasi. Kota Delhi menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kebudayaan, dengan pasar-pasar yang ramai dan beragam barang diperdagangkan. Dinasti Delhi menjadi pusat pengembangan kebudayaan Islam di India. Selama masa ini, terjadi pertukaran budaya antara komunitas Hindu dan Muslim, menciptakan warisan seni, sastra, dan arsitektur yang kaya. Dinasti Delhi membangun berbagai struktur arsitektur megah, termasuk Qutub Minar yang diwariskan dari masa pemerintahan Qutb-ud-din Aibak. Arsitektur ini mencerminkan gaya seni Islam dan menjadi simbol kejayaan dinasti.

Dinasti Delhi menghadapi tantangan dari serangan Mongol dan tentara Ghaznavid. Upaya pertahanan dan kebijakan luar negeri, termasuk persekutuan dengan kekuatan regional, menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Dinasti Delhi mengalami beberapa pergantian dinasti, seperti Dinasti Mamluk, Dinasti Khilji, Dinasti Tughlaq, dan Dinasti Sayyid, masing-masing dengan karakteristik dan kebijakan pemerintahan mereka sendiri. Setiap dinasti memiliki pengaruhnya sendiri terhadap perkembangan ekonomi dan sosial India.

Pertumbuhan Kekayaan dan Pajak

Pada umumnya, Dinasti Delhi menyaksikan pertumbuhan kekayaan melalui pajak yang dikenakan pada perdagangan dan produksi. Sistem pajak ini mungkin dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan membiayai kebijakan pemerintah. Pertumbuhan kekayaan dan kebijakan pajak selama masa Dinasti Delhi (1206-1526 M) memiliki peran sentral dalam membentuk kondisi ekonomi di India pada waktu itu. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dijelaskan:

Dinasti Delhi menyaksikan pertumbuhan kekayaan yang signifikan, terutama melalui sektor perdagangan dan produksi. Kota-kota besar seperti Delhi menjadi pusat aktivitas ekonomi, dan perdagangan antar wilayah dan internasional menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Kekuatan perdagangan yang berkembang mengarah pada urbanisasi yang pesat. Kota-kota seperti Delhi, yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, menjadi magnet bagi pedagang, pengrajin, dan penduduk lainnya. Pertumbuhan kota-kota ini menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis.

Perdagangan yang berkembang pesat menarik perhatian pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, Asia Tengah, dan Tiongkok. Kedatangan pedagang asing memperkaya perdagangan dan membawa berbagai barang dagangan, menciptakan pertukaran budaya dan ekonomi yang beragam. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur, militer, dan administrasi, Dinasti Delhi memberlakukan pajak pada berbagai kegiatan ekonomi. Pajak dikenakan pada perdagangan, produksi barang, dan kekayaan tanah. Meskipun keberlanjutan pajak dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan petani dan produsen, mereka juga berkontribusi pada pendapatan pemerintah.

Pajak juga dikenakan pada sumber daya alam, seperti tambang, dan sektor pertanian. Pajak pertanian mungkin terdiri dari sebagian hasil panen atau pajak tetap. Meskipun ini menyediakan pendapatan untuk pemerintah, terkadang pajak ini dapat memberikan beban berat bagi petani. Pemerintah Dinasti Delhi mungkin memberikan dukungan kepada industri dan manufaktur melalui kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ini. Ini dapat mencakup insentif pajak atau pengecualian untuk usaha-usaha yang mendukung ekonomi dan keamanan negara.

Perdagangan dan Sistem Moneter

Sistem perdagangan yang berkembang menciptakan kebutuhan akan sistem moneter yang efektif. Penggunaan mata uang emas dan perak, seperti dinar dan dirham, tetap berlanjut. Mata uang ini memberikan stabilitas nilai dan memfasilitasi pertumbuhan perdagangan. Dinasti Delhi menjadi pusat perdagangan yang vital di Asia Selatan. Perdagangan antarwilayah yang berkembang mencakup perdagangan rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan barang-barang mewah lainnya. Kehadiran pelabuhan seperti Surat, Cambay, dan Calicut memfasilitasi hubungan perdagangan dengan dunia luar.

Dinasti Delhi menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan Timur Tengah dan Asia Tengah, menghasilkan pertukaran budaya dan ekonomi yang substansial. Kedatangan pedagang dari Baghdad, Samarkand, dan wilayah lainnya memperkaya keragaman barang dagangan dan membentuk jaringan perdagangan yang kuat. Kontak dengan Tiongkok melalui Jalur Sutra membawa kontribusi signifikan terhadap perdagangan. Barang-barang seperti sutra, keramik, dan barang seni Tiongkok menjadi bagian penting dari perdagangan dan kekayaan di Dinasti Delhi. Sistem moneter Dinasti Delhi didasarkan pada penggunaan mata uang emas dan perak. Dinar (emas) dan dirham (perak) digunakan sebagai alat tukar dan standar nilai. Penggunaan mata uang ini menciptakan stabilitas dalam perdagangan dan memfasilitasi transaksi ekonomi yang lebih kompleks.

Dinasti Delhi mewarisi dan melanjutkan tradisi mata uang Islam. Penggunaan dinar dan dirham mencerminkan pengaruh Islam dalam sistem keuangan, memastikan bahwa nilai mata uang didasarkan pada nilai intrinsik logam mulia. Pedagang dan pengusaha memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda ekonomi. Kesuksesan mereka

membentuk struktur sosial dan ekonomi, dan keberhasilan perdagangan tergantung pada keterampilan dan jaringan mereka. Pemerintah Dinasti Delhi mendukung pembangunan pasar dan pusat perdagangan yang memadai. Pasar-pasar ini menjadi tempat pertemuan pedagang dari berbagai wilayah, menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi yang beragam.

Sistem perbankan Islam mulai berkembang, dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Praktik seperti perdagangan berdasarkan prinsip syariah dan penyediaan layanan keuangan sesuai dengan hukum Islam semakin dikenal. Pemerintah Dinasti Delhi memberikan perhatian khusus pada keamanan rute perdagangan. Ini mencakup perlindungan terhadap para pedagang dari serangan perampok dan perompakan yang dapat membahayakan kelancaran perdagangan. Perdagangan yang berkembang mendukung peningkatan produksi barang dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ini menciptakan kekayaan yang lebih besar dan mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pemerintah lainnya.

3.4.2. Kesultanan Bahmani (1347-1527 M)

Kesultanan Bahmani, yang terletak di bagian selatan India, juga berkontribusi pada perkembangan moneter di wilayah itu. Penggunaan mata uang emas dan perak tetap berlanjut, dan sistem keuangan mereka tercermin dalam kesinambungan nilai-nilai Islam.

Pengaruh Moneter Islam

Pengaruh moneter Islam dapat dilihat dalam sistem keuangan India pada saat itu. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam perdagangan dan kestabilan mata uang, tercermin dalam penggunaan mata uang emas dan perak. Ini juga mencerminkan integrasi India ke dalam jaringan perdagangan global yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Periode ini menyaksikan pertumbuhan perdagangan yang pesat di India. Keterlibatan dalam perdagangan internasional memperkuat penggunaan mata uang emas dan perak sebagai standar nilai yang diterima secara luas. India menjadi pusat perdagangan yang penting, dan pengaruh kebijakan moneter Islam memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi. (Juhro 2021)

Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani berkontribusi pada pertumbuhan kota dan pusat

perdagangan di India. Kota-kota seperti Delhi, Agra, dan Bidar menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan penggunaan mata uang emas dan perak. Kebijakan pajak selama masa Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani dapat mencerminkan strategi ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah. Pajak yang diterapkan pada perdagangan dan produksi barang mungkin dirancang untuk mendukung kestabilan ekonomi dan penerimaan fiskal. Selain aspek ekonomi, Islam juga memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan budaya dan keilmuan di India pada masa itu. Pengaruh ini dapat memengaruhi pola konsumsi, inovasi teknologi, dan pemahaman terhadap konsep ekonomi dalam masyarakat. (Brownstok dkk. t.t.)

Melalui Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani, India pada periode ini menunjukkan keragaman dan kompleksitas dalam perkembangan ekonomi dan moneter, dengan pengaruh kuat dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membentuk dasar sistem keuangannya.

Mata Uang Emas dan Perak

Kesultanan Bahmani, seperti banyak kerajaan Islam pada saat itu, mungkin menggunakan mata uang emas dan perak sebagai standar transaksi ekonomi. Penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) mencerminkan warisan moneter Islam dan memberikan stabilitas dalam perdagangan. Kebijakan moneter Kesultanan Bahmani mungkin mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan terhadap riba atau bunga. Sistem perbankan dan kebijakan pinjaman mungkin didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. (Anon t.t.)

Kesultanan Bahmani dapat mengadopsi prinsip-prinsip sistem keuangan Islam, yang melibatkan praktik seperti zakat (sumbangan amal), wakaf (sumbangan untuk tujuan amal), dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Mata uang yang stabil dan praktik ekonomi Islam mungkin telah mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Kesultanan Bahmani. Perdagangan dengan kerajaan tetangga dan keterlibatan dalam jalur perdagangan internasional dapat memperkuat penggunaan mata uang mereka. Kesultanan Bahmani mungkin telah mengembangkan infrastruktur ekonomi, termasuk sistem transportasi dan perdagangan, yang

mendukung kegiatan ekonomi dan pertukaran mata uang.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal Kesultanan Bahmani mungkin mencakup pengenalan pajak yang adil dan kebijakan keuangan yang mendukung keseimbangan ekonomi. Pajak mungkin dikenakan pada produksi, perdagangan, atau sektor ekonomi lainnya. Kesultanan Bahmani mungkin memberikan dukungan kepada pedagang dan pengusaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pusat-pusat perdagangan dan pasar mungkin menjadi fokus untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi. Kesultanan Bahmani dapat terlibat dalam perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang yang diterima secara luas di pasar internasional, yang mungkin mencakup mata uang emas dan perak yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. (S.U 2017)

Kebijakan fiskal Kesultanan Bahmani pada abad ke-14 hingga ke-16 mungkin mencakup beberapa aspek yang terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan manajemen keuangan. Kebijakan fiskal Kesultanan Bahmani melibatkan pengenalan pajak pertanian. Pajak ini mungkin dikenakan pada hasil panen petani dan bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan untuk pemerintah. Mengingat pentingnya perdagangan dalam ekonomi Kesultanan Bahmani, pemerintah mungkin memberlakukan pajak pada kegiatan perdagangan. Pajak ini dapat dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan di pasar-pasar atau melalui jalur perdagangan internasional.

Pemerintah Kesultanan Bahmani mungkin mendapatkan pendapatan dari infrastruktur yang dikembangkan, seperti jalan, bendungan, atau pelabuhan. Pungutan mungkin diberlakukan untuk pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Pajak properti dan kekayaan mungkin diterapkan sebagai sumber pendapatan. Pemilik tanah atau properti mungkin diminta untuk membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pemerintahan dan infrastruktur. Kesultanan Bahmani, sebagai entitas Islam, mungkin menerapkan konsep zakat dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal mereka. Zakat adalah sumbangan amal yang diberikan oleh masyarakat Muslim untuk kepentingan umum, sementara wakaf melibatkan sumbangan untuk tujuan amal yang bersifat abadi.

Pendapatan yang dikumpulkan melalui berbagai pajak dan sumbangan mungkin digunakan untuk

membayai proyek-proyek infrastruktur, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Penggunaan dana ini dapat mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, atau pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal Kesultanan Bahmani mungkin ditujukan untuk mencapai keberlanjutan dan keseimbangan anggaran. Pemerintah mungkin berusaha mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

3.5. Kebijakan Moneter Turki Ustmani

Kesultanan Utsmani menerapkan sistem mata uang bimetal, yang mencakup penggunaan dua logam berharga sebagai standar nilai, yaitu emas dan perak. Mata uang emas, seperti ducat, dan perak, seperti akçe, digunakan dalam transaksi sehari-hari. Sistem ini memberikan fleksibilitas dan stabilitas dalam perdagangan. Kekuatan ekonomi dan politik Kesultanan Utsmani memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan moneter mereka. Stabilitas dan kemakmuran ekonomi Kesultanan Utsmani memberikan dasar bagi sistem keuangan yang kokoh. (Sakirah dkk. 2022)

Utsmani dikenal melakukan inovasi keuangan yang signifikan. Penggunaan surat berharga, seperti sukuk (obligasi syariah), dapat menjadi contoh dari upaya Kesultanan Utsmani dalam mengembangkan instrumen keuangan yang memungkinkan pengumpulan dana untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau militer.

Sistem Perbankan Islam

Kesultanan Utsmani mungkin telah mengembangkan sistem perbankan Islam. Prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga) dan dukungan pada prinsip keadilan ekonomi, mungkin tercermin dalam operasi perbankan mereka. Lembaga-lembaga keuangan Islam yang melibatkan perdagangan berdasarkan prinsip syariah dapat berperan dalam memfasilitasi kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Ak 2017)

Kesultanan Utsmani memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara lain, terutama selama periode kejayaan mereka. Keterlibatan dalam perdagangan internasional mempengaruhi kebijakan moneter mereka dan mendukung penggunaan mata uang Utsmani dalam perdagangan lintas batas.

Penetapan Nilai Mata Uang

Kebijakan moneter Utsmani melibatkan penetapan nilai mata uang mereka, baik emas maupun perak, yang menciptakan kerangka kerja untuk harga dan transaksi ekonomi. Penetapan nilai ini memainkan peran penting dalam perdagangan domestik dan internasional. Stabilitas mata uang menjadi fokus utama kebijakan moneter Utsmani. Ini mencakup menjaga nilai mata uang, mencegah inflasi berlebihan, dan memastikan kepercayaan dalam sistem keuangan. (Warjiyo dan Solikin 2017) Kebijakan moneter Utsmani diintegrasikan dengan tujuan ekonomi dan militer. Pendanaan proyek-proyek militer atau infrastruktur dapat mencerminkan keseimbangan antara kebijakan moneter dan tujuan politik dan militer.

Kesultanan Utsmani mendasarkan kebijakan moneter mereka pada prinsip-prinsip Islam, yang mencakup larangan terhadap riba dan perhatian pada keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mungkin menciptakan landasan etika dalam pengembangan dan implementasi kebijakan moneter.

Penggunaan Mata Uang Utsmani dalam Perdagangan Internasional

Mata uang Utsmani, seperti akçe, sering digunakan dalam perdagangan internasional. Stabilitas dan penerimaan mata uang Utsmani di berbagai pasar internasional memperkuat posisi ekonomi Kesultanan Utsmani dalam perdagangan global. Kebijakan moneter Utsmani mungkin didesain untuk memberdayakan pedagang dan pengusaha. Penggunaan mata uang yang stabil dan sistem perbankan Islam dapat memberikan dukungan kepada sektor bisnis dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Kesultanan Utsmani memiliki hubungan keuangan yang erat dengan negara-negara Muslim lainnya. Pertukaran keuangan yang melibatkan transfer dana, investasi, dan perdagangan dengan negara-negara Muslim dapat memengaruhi kebijakan moneter Utsmani. (Azzahra 2023)

Kebijakan moneter Utsmani melibatkan penyelenggaraan anggaran pemerintah yang cermat. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek khusus atau kebutuhan militer mungkin dikelola dengan teliti untuk menjaga keseimbangan keuangan. Kesultanan Utsmani mungkin menghadapi berbagai krisis ekonomi selama sejarahnya. Kebijakan moneter mereka mungkin mencakup respons terhadap krisis, seperti penyesuaian nilai mata uang atau langkah-

langkah kebijakan fiskal untuk mengatasi tantangan ekonomi.

Keterlibatan dalam Perdagangan Barang-barang Bernilai Tinggi

Kebijakan moneter Utsmani mungkin mendukung keterlibatan dalam perdagangan barang-barang bernilai tinggi, seperti rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Penggunaan mata uang yang stabil dan inovasi keuangan dapat memfasilitasi perdagangan barang-barang bernilai tinggi ini. Penemuan jalur laut baru dan perluasan perdagangan dunia selama periode ini mungkin mempengaruhi kebijakan moneter Utsmani. Kesultanan ini dapat merespon dengan menyesuaikan strategi perdagangan dan mata uang untuk tetap relevan dalam konteks perubahan dunia. (Susila 2022)

Eksplorasi dan ekspansi wilayah Utsmani mungkin mendapat dukungan dari kebijakan moneter yang mendukung pendanaan ekspedisi militer atau pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah baru yang dikuasai. Kesultanan Utsmani, sebagai kekaisaran besar, mungkin memberikan perhatian khusus pada pendanaan militer. Kebijakan moneter dapat dirancang untuk mendukung pengeluaran militer yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan memperluas wilayah kekaisaran. Kebijakan moneter Utsmani mungkin mencakup strategi untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi eksternal. (Helmiati 2014) Dengan menjaga kestabilan mata uang dan keberlanjutan ekonomi, Kesultanan Utsmani mungkin berusaha mengurangi dampak negatif dari perubahan ekonomi global. Akibat kebijakan moneter yang diterapkan, masyarakat Utsmani mungkin mengalami dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk stabilitas harga, ketersediaan barang-barang konsumsi, dan akses ke layanan keuangan.

4. KESIMPULAN

Terdapat kontinuitas dalam penggunaan mata uang emas dan perak, seperti dinar dan dirham, mengikuti tradisi ekonomi Islam. Mata uang ini tidak hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam. Kebijakan moneter di setiap wilayah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik regional. Kekuatan ekonomi dan politik suatu negara atau dinasti memainkan peran kunci dalam pembentukan kebijakan moneter. Beberapa wilayah mengadopsi inovasi keuangan,

seperti penggunaan surat berharga dan pengembangan sistem perbankan Islam. Ini mencerminkan upaya untuk mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Stabilitas mata uang dan larangan terhadap riba adalah ciri khas kebijakan moneter Islam pada masa tersebut. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Perdagangan internasional memiliki dampak signifikan pada kebijakan moneter. Penggunaan mata uang Islam yang diterima secara luas dalam perdagangan membantu memperkuat posisi ekonomi dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Kesultanan Utsmani dan Persia muncul sebagai pusat keuangan dan ekonomi yang penting. Kebijakan moneter mereka mencerminkan peran sentral dalam perdagangan dan keuangan internasional serta upaya untuk mencapai stabilitas dalam ekonomi mereka. Kebijakan moneter juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pendanaan dari sistem keuangan Islam digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang diperlukan. Seluruh periode ini mencirikan integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan moneter. Larangan terhadap riba, penerapan zakat, dan perhatian pada keadilan ekonomi menjadi landasan dari kebijakan ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, sejarah kebijakan moneter dalam Islam pada masa Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Kesultanan Utsmani menciptakan landasan yang kokoh untuk perkembangan ekonomi dan keuangan di dunia Islam, mempertahankan prinsip-prinsip etika dan keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A, Faisal Ismail, M. 2018. *Studi Islam Kontemporer*. IRCiSoD.
- Afdhal, Zulkifli, Nurul Fadilah, Nahuda, Nor Rochmatul W, Nurliana, Darmawati, Khaeruddin, Syahdara Anisa Makruf, Najamuddin Petta Solong, Andri Nurjaman, A. Zaenurrosyid, Burhan Nudin, Miftah Ulya, dan Ahmad Asroni. 2023. *Sejarah Peradaban Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Aizid, Rizem. 2018. *Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia*. NOKTAH.
- Ak, Drs Ismail, MBA. 2017. *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Amir, Amri. 2021. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing.
- Anon. t.t. *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Yudhistira Ghalia Indonesia.

- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. t.t. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- As-Sirjani, Raghieb. 2013. *Bangkit dan Runtuhnya Andalusia*. Pustaka Al-Kautsar.
- Azzahra, Humaira. 2023. *Status Vasal Kesultanan Aceh di Mata Turki Utsmani Pada Abad XIX*. Penerbit A-Empat.
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga masa kini*. Penerbit Serambi.
- Bobrick, Benson. 2013. *Kejayaan Sang Khalifah Harun ar-Rasyid: Kemajuan Peradaban Dunia pada Zaman Keemasan Islam*. Pustaka Alvabet.
- Brownstok, Willem, Stanford Mc Krause, dan Yuri Galbinst. t.t. *Islam: Dari Invasi Mongol ke Penaklukan Muslim di India*. Cambridge Stanford Books.
- Conermann, Stephan. 2014. *History and Society During the Mamluk Period (1250-1517)*. V&R unipress GmbH.
- dkk, Dr H. Fakhry Zamzam, M. M. ., M. H. 2019. *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Kencana.
- Faisal Ismail. 2017. *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. IRCISOD.
- Harymawan, Iman, Fajar Kristanto Gautama Putra, Aditya Aji Prabhawa, dan Nadia Klarita Rahayu. 2022. *KEBERLANJUTAN, EKONOMI SIRKULAR, DAN PENGUKURANNYA - Perspektif Korporasi*. Airlangga University Press.
- Hasmand, Fedrian. t.t. *Kronologi Sejarah Islam dan Dunia: (571 M S/D 2016)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Havis Aravik,. 2018. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama*. Kencana.
- Helmiati. 2014. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- J. Suyuthi Pulungan. 2022. *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Juhro, Solikin M. 2021. *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamil, Sukron. 2022. *Islam Dan Sains Modern*. Prenada Media.
- Latif, Yudi. 2006. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Mizan Pustaka.
- Madjid, Nurcholish. 2019. *Khazanah Intelektual Islam*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish.
- M.Si. (Penyunting), David Marsh &. Gerry Stoker, Helmi Mahadi dan Shohifullah (Penerjemah), Sufyanto. 2021. *Metode Komparatif: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik*. Nusamedia.
- Mu'nis, Husain. 2022. *Quraisy: Dari Kabilah Makkah Ke Peradaban Dunia*. Pustaka Al-Kautsar.
- PhD, Gilad James. t.t. *Pengantar Azerbaijan*. Gilad James Mystery School.
- Qoyum, Abdul. 2021. *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.
- Sakirah, Fachrudin Fiqri Affandy, Memet Slamet, Hisam Ahyani, Difi Dahliana, Prima Dwi Priyatno, Andi Zulfikar Darussalam, Parman Komarudin, Atika Zahra Maulida, Faqih El Wafa, Agus Purnomo, Miftah Idris, dan Yunisa Fitriana. 2022. *PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM: (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Penerbit Widina.
- Samsul Munir Amin; 2022. *Sejarah Dakwah*. Amzah.
- Saprida. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- S.U, Prof Dr I. Wayan Sudirman, S. E. 2017. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.
- Susila, Wayan R. 2022. *Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Terapan*. Prasetya Mulya Publishing.
- Thaqqus, Muhammad Suhail. t.t. *Bangkit dan Runtuhnya Dinasti Mamluk*. Pustaka Al-Kautsar.
- Thaqqusy, Muhammad Suhail. t.t. *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Fathimiyah*. Pustaka Al-Kautsar.
- Warjiyo, Perry, dan Solikin. 2017. *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.